

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Partisipan Eksperimen

Bab ini menyajikan hasil penelitian empiris dan pembahasan hasil penelitian eksperimen ini. Bagian pertama menyajikan profil partisipan yang dipilih dari segi jumlah, pembagian antara grup 1 (*control group, CG*) dan grup 2 (*threatment, TG*) ke dalam jumlah yang sama, dan waktu serta tempat pelaksanaan eksperimen.

Bagian kedua menyajikan profil partisipan dari segi demografi seperti jenis kelamin, umur, status, penghasilan, kepemilikan NPWP, Pengisian SPT Tahunan, pernah atau tidak partisipan mengikuti kelas etika. Bagian ketiga menyajikan statistik deskriptif, kemudian bagian keempat menyajikan hasil uji validitas dan reliabilitas. Bagian kelima pada bab ini menyajikan hasil uji manipulasi dari kasus penggelapan pajak yang dijadikan *treatment* dalam eksperimen ini. Bagian keenam, bagian terakhir pada bab ini akan menyajikan hasil uji hipotesis.

Penulis mengundang pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebagai target partisipan eksperimen. Cakupan wilayah domisili partisipan adalah Kabupaten Sleman Propinsi DIY. Pengusaha UMKM tersebut diundang untuk hadir dalam Pelatihan Pengungkapan Aset Sukarela (PAS Final). PAS Final merupakan program Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJP Kemenkeu RI) setelah program pengampunan pajak (TA) yang berakhir per 31 Maret 2017.

Kriteria partisipan adalah wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sistem *self-assessment*, mempunyai Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP), dan mempunyai penghasilan yang dipotong pajak penghasilan. Dengan demikian, kriteria wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sistem *self-assessment* dapat terpenuhi. Penulis berhasil menjangkau 142 orang yang mengaku sebagai pengusaha UMKM. Pelaksanaan kegiatan eksperimen adalah tanggal 13 September 2018.

Namun tidak semua dari 142 orang partisipan yang diundang memenuhi kriteria pembayar pajak dengan sistem *self-assessment*. Dari total 142 orang yang bersedia menjadi partisipan, hanya 84 yang memenuhi syarat sesuai kriteria awal yang ditentukan. Penyebabnya antara lain karena ternyata tidak mempunyai NPWP, penghasilannya tidak dipotong penghasilan, sehingga tidak pernah melakukan laporan tahunan melalui SPT Tahunan (Surat Pemberitahuan Tahunan). Oleh sebab itu, 58 orang partisipan ini tidak dapat digolongkan sebagai wajib pajak yang menjalankan kewajibannya perpajakannya dengan sistem *self-assessment*. Namun demikian, semua partisipan yang berpartisipasi (142 orang) tetap ikut menjadi partisipan dengan tetap ikut serta dalam pengisian kuesioner.

Dalam melaksanakan eksperimen, partisipan dibagi menjadi 2 kelompok (group) secara random, dengan masing-masing kelompok sebanyak 72 orang. Kelompok 1 adalah kelompok kontrol (CG), yaitu kelompok yang tidak diberi *treatment* (tidak mengetahui tentang informasi penggelapan pajak) sedangkan kelompok 2 adalah kelompok *treatment*, yaitu kelompok yang diberi *treatment* berupa kasus penggelapan pajak (mengetahui tentang informasi penggelapan pajak), presentasi dari peneliti, dan juga media audio visual berupa video tentang

pajak yang dibuat oleh DJP Kemenkeu RI<sup>10</sup>. Kasus penggelapan pajak yang menjadi *treatment* adalah kasus yang mengindikasikan penggelapan/penghindaran pajak yang cukup menonjol dan terpublikasi dengan baik di media masa untuk kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Kasus yang digunakan dalam eksperimen ini terdapat pada bagian lampiran.

Partipan yang memenuhi syarat sebagai pembayar pajak *self-assessment* berjumlah 84 orang dan dibagi kedalam dua kelompok secara acak (*random*) sehingga untuk masing-masing kelompok, baik kelompok kontrol dan kelompok *treatment* berjumlah masing-masing 42 orang partisipan. Demografi dan profil partisipan yang memenuhi kriteria dalam penelitian eksperimen ini dirangkum seperti pada Tabel 4.1 di halaman selanjutnya.

Seperti pernah disebutkan sebelumnya tentang subjek eksperimen, penelitian ini dilakukan dengan bantuan partisipan yang merupakan pengusaha/pedagang. Kriteria partisipan yang dipilih (pengusaha/pedagang) adalah wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sistem *self-assessment*, yang mana pada sistem ini perilaku wajib pajak menjadi hal yang sangat dominan terutama untuk isu-isu kepatuhan. Karena karakteristik-karakteristik demografi seperti pada Tabel 4.1, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa subjek eksperimen adalah pembayar pajak dengan sistem *self-assessment*.

---

<sup>10</sup> Tautan video untuk treatment experiment: <https://youtu.be/gNLhv0Mer8g>, <https://youtu.be/pgHqUuamyZQ>, <https://youtu.be/q0oK4V0uT7E>.

**Tabel 4.1**  
**Demografi dan Profil Partisipan**

	Frekuensi	Persen		Frekuensi	Persen
<b>Gender</b>			<b>Mengisi SPT Tahunan</b>		
Laki-laki	32	38,1%	Ya	70	83,3%
Perempuan	52	61,9%	Tidak	14	16,7%
<b>Umur</b>			<b>Pengisian SPT dengan jasa orang lain</b>		
20-30 tahun	14	16,7%	Ya	56	66,7%
30-40 tahun	44	52,4%	Tidak	28	33,3%
40-50 tahun	21	25,0%			
Di atas 50 tahun	5	6,0%			
<b>Status</b>			<b>Pelatihan tentang etika</b>		
Menikah	78	92,9%	Ya	14	16,7%
Tidak Menikah	6	7,1%	Tidak	70	83,3%
<b>Penghasilan bruto per tahun</b>			<b>Ikut program <i>Tax Amnesty</i></b>		
Kurang dari 54 juta/tahun	48	57,1%	Ya	37	44,0%
55 juta s.d. 250 juta/tahun	27	32,1%	Tidak	47	56,0%
250 juta s.d. 500 juta/tahun	9	10,7%			

Sumber: Data diolah

Pada bagian metoda penelitian disinggung bahwa penggunaan partisipan mahasiswa sebagai subjek eksperimen masih banyak menimbulkan keraguan. Alpert (1967) membandingkan opini antara kelompok pelaku bisnis dan kelompok para mahasiswa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa opini pelaku bisnis jauh lebih baik dibandingkan opini para mahasiswa. Copeland, *et al.* (1973) meneliti perilaku berbagai kelompok antara kelompok mahasiswa dan bukan mahasiswa tentang suatu penerbitan laporan keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sikap mahasiswa dan bukan mahasiswa. Varosi *et al.* (2000) mengungkapkan bahwa penelitian tentang kepatuhan pajak (*tax compliance research*) sering menggunakan mahasiswa

sebagai subjek penelitian. Dalam mengantisipasi apakah latar belakang pengalaman pajak partisipan mahasiswa dianggap *representative* sebagai surogasi (pengganti) dari pembayar pajak, Varosi *et al.* (2000) menggunakan cara menggumpulkan karakteristik demografi dan latar belakang pajak yang memenuhi relevansi pembayar pajak. Karena karakteristik-karakteristik demografi tersebut, Varosi *et al.* (2000) menyimpulkan bahwa subjek partisipan mahasiswa dapat menjadi surogasi (pengganti) dari pembayar pajak.

Dalam penelitian eksperimen ini, penulis memilih partisipan dengan karakteristik pembayar pajak seperti data penghasilan per tahun partisipan, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembayaran pajak penghasilan, dan pernah atau tidaknya partisipan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT). Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa wajib pajak yang menjadi subjek eksperimen memenuhi kriteria pembayar pajak dengan sistem *self-assessment* dan dapat diandalkan untuk menjadi partisipan eksperimen dalam penelitian ini. (*purposive sampling*).

Dari data yang dijelaskan di Tabel 4.1, 52,4% partisipan berumur antara 30-40 tahun dan 25% antara 40-50 tahun dan partisipan yang menikah mencapai 92,9%. Mayoritas partisipan berpenghasilan bruto adalah kurang dari 54 juta/tahun dan 32% berpenghasilan bruto antara 55 juta sampai dengan 250 juta/tahun dan sisanya 10% berpenghasilan bruto diatas 250 juta rupiah/tahun. Sebagian besar partisipan juga rutin melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (83%) dan 44% partisipan mengaku mengikuti program amnesti pajak (TA). Dengan profil partisipan yang berhasil dijaring, diharapkan dapat memenuhi kriteria wajib pajak

*self-assessment*.

Selanjutnya, partisipan dibagi berdasarkan kategori masing-masing variabel. Tabel 4.2 di bawah menampilkan jumlah partisipan berdasarkan kategori tidak tahu (tidak dilakukan *treatment*) dan tahu (dilakukan *treatment*) untuk variabel informasi penggelapan pajak (Group), kategori tinggi dan rendah untuk variabel prinsip moral (PM), kategori tinggi dan rendah untuk variabel penghasilan wajib pajak (PHSL), serta kategori etis dan tidak etis untuk variabel persepsi etis wajib pajak (PE).

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Partisipan Berdasarkan Kategori Masing-Masing Variabel**

<i>Between-Subjects Factors</i>			
		Kategori	Jumlah
Group	0	Control group	42
	1	Treatment group	42
Prinsip moral	0	Prinsip moral tinggi	42
	1	Prinsip moral rendah	42
Penghasilan	0	Penghasilan rendah	48
	1	Penghasilan tinggi	36
Persepsi Etis	0	Persepsi “tidak etis” pada penggelapan pajak	42
	1	Persepsi “etis” pada penggelapan pajak	42

Sumber: Data diolah

Pengelompokan berdasarkan kategori seperti pada Tabel 4.2 di atas merupakan hasil pengelompokan dari proses *median split*. Pada variabel prinsip moral, jika *score* lebih rendah daripada median maka termasuk kategori prinsip moral “tinggi” dan sebaliknya. Pada variabel penghasilan, jika penghasilan kurang dari 54 juta rupiah maka akan termasuk kategori penghasilan “rendah” dan



sebaliknya. Pada variabel persepsi etis, jika *score* lebih rendah daripada median maka termasuk kategori “persepsi tidak etis” pada penggelapan pajak dan jika *score* lebih tinggi daripada median maka termasuk kategori persepsi “tidak etis” pada penggelapan pajak.

### B. Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 4.3 di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan tabel tersebut nilai KMO MSA (*Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy*) menunjukkan nilai  $>0,5$  dengan signifikansi 0,000, yang artinya valid. Ada beberapa pernyataan yang tidak valid yang nilai *factor loadings* di bawah 0,4 sehingga pertanyaan tersebut harus dibuang. Pernyataan untuk variabel kecenderungan penghindaran pajak (KCD) yang dibuang adalah pertanyaan nomor 4, 5, 6, 7, 10, 11, dan 12. Pernyataan untuk variabel prinsip moral (PM) yang dibuang adalah pertanyaan nomor 1, 9, dan 10. Pertanyaan untuk variabel persepsi etis (PE) yang dibuang adalah pertanyaan nomor 5, 7, dan 9. Setelah dilakukan uji validitas, kemudian dilakukan uji reliabilitas. Tabel 4.3 di bawah ini menunjukkan nilai Cronbach's Alpha  $>0,6$ , yang artinya reliabel.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

Variabel	KMO MSA	Sig.	Factor Loadings	Cronbach's Alpha
Kecenderungan Penghindaran Pajak (KCD)	0,727	0,000	0,432-0,731	0,785
Prinsip Moral (PM)	0,795	0,000	0,485-0,811	0,861
Persepsi Etis (PE)	0,832	0,000	0,459-0,827	0,920

Sumber: Data diolah

### C. *Manipulation Check* (Uji Manipulasi)

Penelitian yang dilakukan Varosi *et al.* (2000), Utama (2010), dan Utama (2011) melakukan uji manipulasi (*manipulation check*) dengan cara mendesain sebuah pertanyaan yang diberikan kepada partisipan untuk memeriksa seberapa jauh konsep penghindaran pajak dipahami oleh partisipan. Penelitian eksperimen juga melakukan langkah serupa. *Mean score* digunakan untuk mendeteksi tingkat pemahaman partisipan terhadap konsep penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Varosi *et al.* (2000), nilai *mean score*-nya mencapai 3,96 yang artinya partisipan dinilai memahami konsep penghindaran pajak. Selain itu, mayoritas partisipan (79%) menyatakan sangat setuju (skor 5) dan setuju (skor 4) pada kasus penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian Varosi *et al.* (2000) berhasil menciptakan situasi penghindaran pajak yang dapat dipertimbangkan dengan baik oleh partisipan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Utama (2010), *mean score*-nya mencapai 4,18 dan mayoritas partisipan (88,0%) menyatakan sangat setuju (skor 5) dan setuju (skor 4), sehingga menunjukkan bahwa kasus penggelapan pajak yang digunakan sebagai treatment dapat dipertimbangkan dan dipahami oleh partisipan.

Tabel 4.4 di bawah ini menunjukkan hasil *manipulation check* dari penelitian eksperimen ini. Pada penelitian ini, *mean score* mencapai 3,57 dari skor 4 untuk kelompok kontrol. *Mean score* untuk kelompok treatment mencapai 3,21 dari skor 4 untuk kasus pertama dan 3,43 dari skor 4 untuk kasus kedua. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kasus AAG (Asian Agri Grup) dan BCA yang merupakan kasus penggelapan pajak yang menonjol (*salient*) pada masanya



berhasil dikategorikan sebagai situasi penggelapan pajak yang dapat dipertimbangkan dan dipahami oleh partisipan dengan tingkat pemahaman yang memadai.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Manipulasi**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Variance
Kasus 1 & 2 (CG)	42	1	4	3,57	0,630	0,397
Kasus 1 (TG)	42	1	4	3,21	1,071	1,148
Kasus 2 (TG)	42	1	4	3,43	0,801	0,641

Keterangan: CG: Control group; TG: Treatment group

Sumber: Data diolah

#### **D. Pengujian Hipotesis**

##### **1. Pengujian Hipotesis 1 sampai 4**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *Two-Way ANOVA* dengan pilihan *General Linear Model*. Sebelum melakukan *Two-Way ANOVA*, tiga asumsi haruslah terpenuhi, yaitu sampel berasal dari kelompok yang tidak saling berhubungan, berdistribusi normal, dan variansnya sama. Sampel dalam penelitian dikelompokkan berdasarkan kategori yang berbeda sehingga asumsi bahwa sampel berasal dari kelompok yang tidak saling berhubungan terpenuhi.

Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji normalitas untuk variabel kecenderungan penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig*)  $>0,05$  (0,072), yang artinya data terdistribusi normal.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Normalitas**

	<i>Asymp. Sig.</i>	Keterangan
KCD	0,072	Distribusi Normal

Sumber: Data diolah

Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji varians. Nilai signifikansi dari *Levene's Test* menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05 (0,947), yang artinya varians antar kelompok kategori bisa dianggap sama. Jika terjadi penyimpangan terhadap asumsi ANOVA, masih dianggap *robust*, maka tetap dapat melanjutkan analisis (Ghozali, 2018).

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Varians**

Levene's Test (Sig.)	Keterangan
0,947	Varians antar kelompok sama

Sumber: Data diolah

Setelah ketiga asumsi terpenuhi, dilakukan pengujian hipotesis menggunakan *General Linear Model*. Tabel 4.7 berikut ini menunjukkan hasil pengujian hipotesis.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Two-Way ANOVA dengan *General Linear Model***

Variabel	Sig.	Keterangan
Group	0,003***	H <sub>1</sub> didukung
Prinsip Moral	0,002***	H <sub>2</sub> didukung
Penghasilan	0,055*	H <sub>3</sub> didukung
Persepsi Etis	0,427	H <sub>4</sub> tidak didukung

\*Signifikan pada level 0.10; \*\*Signifikan pada level 0.05; \*\*\*Signifikan pada level 0.01  
Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.7, informasi penggelapan pajak (Group) berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penghindaran pajak (KCD) dengan nilai signifikansi <0,05 (0,003) sehingga H<sub>1</sub> didukung. Prinsip moral (PM) berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penghindaran pajak (KCD) karena nilai

*commit to user*

signifikansinya  $<0,05$  (0,002) sehingga  $H_2$  didukung. Penghasilan (PHSL) berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penghindaran pajak (KCD) karena nilai significansinya juga  $<0,1$  (0,055) sehingga  $H_3$  juga didukung. Persepsi etis (PE) tidak berpengaruh signifikan terhadap KCD karena nilai significansinya  $>0,05$  (0,427) sehingga  $H_4$  tidak didukung.

Namun, jika diinteraksikan antara variabel kelompok (*group*) antara kelompok yang tidak tahu (CG) dan tahu informasi penggelapan pajak (TG) dengan variabel prinsip moral (Group\*PM) maka hasilnya signifikan (0,003). Interaksi kelompok dengan penghasilan (Group\*PHSL) dan kelompok dengan persepsi etis (Group\*PE) hasilnya tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penghindaran pajak (KCD) karena nilai significansinya  $>0,05$  (0,819 dan 0,271). Interaksi Group\*PM dengan nilai signifikasi 0,003 menunjukkan bahwa ada *interaction effect*. Sedangkan interaksi lainnya yaitu Group\*PHSL dan Group\*PE tidak terdapat *interaction effect*. Dengan kata lain, jika prinsip moral diinteraksikan dengan penghasilan dan persepsi etis, hanya prinsip moral yang mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak (*interaction effect*).

## 2. Pengujian Hipotesis 5 sampai 8

Penelitian ini menguji pengaruh prinsip moral, penghasilan, persepsi etis, dan kecenderungan penghindaran pajak pada preferensi amnesti pajak. Karena variabel dependen merupakan variabel dummy, penelitian ini diuji menggunakan regresi logistik. Tabel 4.8 menunjukkan hasil pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Regresi Logistik Biner**

**Model 1: TA = a + b<sub>1</sub>PM + b<sub>2</sub>PHSL + b<sub>3</sub>PE + b<sub>4</sub>KCD**

Variabel	Arah Hipotesis	Koefisien Regresi	Sig.	Keterangan
PM	+	1,592	0,009***	H <sub>5</sub> didukung
PHSL	-	-1,627	0,031**	H <sub>6</sub> didukung
PE	+	1,454	0,017**	H <sub>7</sub> didukung
KCD	+	0,358	0,545	H <sub>8</sub> tidak didukung
Nagelkerke R <sup>2</sup>	0,253			
Sig. of Hosmer & Lemeshow Test	0,925			
Sample size	84			

\*Signifikan pada level 0.10; \*\*Signifikan pada level 0.05; \*\*\*Signifikan pada level 0.01  
Sumber: Data diolah

Keterangan:

TA: *tax amnesty* (ikut/tidak ikut)

PM: prinsip moral wajib pajak (tinggi/rendah)

PHSL: penghasilan wajib pajak (tinggi/rendah)

PE: perilaku etis wajib pajak (etis/tidak etis)

KCD: kecenderungan penghindaran pajak wajib pajak (tinggi/rendah)

Model 1 adalah hasil pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik. Hasil dalam Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai Nagelkerke R<sup>2</sup> sebesar 0.253 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 25,3%. Kemudian, nilai signifikansi dari Hosmer and Lemeshow Test sebesar 0.925 (lebih besar dari 0.05) yang artinya model mampu memprediksi nilai observasinya atau model dikatakan *fit* atau layak.

Hasil regresi logistik yang ada di Tabel 4.8 menunjukkan didukungnya hipotesis ke-5, yaitu wajib pajak dengan prinsip moral yang tinggi memilih untuk mengikuti amnesti pajak (koefisien regresi PM adalah 1,592 dan signifikan pada level 0.01). Hipotesis ke-6 juga didukung, yaitu wajib pajak dengan penghasilan

tinggi juga memilih untuk ikut amnesti pajak (koefisien regresi PHSL adalah -1,627 dan signifikan pada level 0,05). Hipotesis ke-7 menunjukkan didukung, yaitu wajib pajak dengan persepsi tidak etis pada penggelapan pajak memilih untuk ikut amnesti pajak (koefisien regresi PE adalah 1,454 dan signifikan pada level 0,05). Hipotesis ke-7 tidak didukung, hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi kecenderungan penghindaran pajak (KCD) adalah 0,358 dengan signifikansi 0,545. Dengan demikian, hipotesis ke-7, yaitu wajib pajak dengan kecenderungan penghindaran pajak yang rendah memilih untuk mengikuti program TA menjadi tidak terbukti.

## **E. Pembahasan**

### **1. Pembahasan Hipotesis 1**

Hasil pengujian hipotesis 1 (Tabel 4.7) menunjukkan bahwa informasi penggelapan pajak (Group) berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penghindaran pajak (KCD). Jadi, pernyataan hipotesis ke-1 tentang pengetahuan wajib pajak terhadap informasi penggelapan pajak menurunkan kecenderungan wajib pajak untuk menghindari pajak didukung. Hal ini mendukung penelitian Varosi *et al.* (2000). Pengetahuan dari seseorang mengenai situasi penghindaran pajak yang dipublikasikan dengan baik akan mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk menghindari pajak. Lebih spesifik lagi, Varosi *et al.* (2000) menyatakan bahwa kecenderungan seseorang untuk menghindari pajak menurun ketika individu tersebut memiliki pengetahuan tentang penggelapan pajak.

Penelitian ini sesuai dengan teori perbandingan sosial. Teori ini menyatakan bahwa situasi penghindaran pajak yang menonjol (*salient*) mungkin atau tidak

mungkin menghasilkan kecenderungan dalam berperilaku tidak patuh terhadap pajak. Teori keadilan dan teori perbandingan sosial bertolak belakang, namun penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap informasi penggelapan pajak akan mempengaruhi kecenderungan wajib pajak untuk menghindari pajak (Husein, 2003; Hutama, 2010; Hutama, 2011; Bayer *et al.*, 2015; Nar, 2015; Alm *et al.*, 2015; Cyan *et al.*, 2016).

## 2. Pembahasan Hipotesis 2

Hasil pengujian hipotesis 2 (Tabel 4.7) menunjukkan bahwa prinsip moral (PM) berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penghindaran pajak (KCD). Jadi, pernyataan hipotesis ke-2 tentang wajib pajak dengan prinsip moral yang tinggi memiliki kecenderungan yang rendah untuk menghindari pajak didukung. Hal ini sesuai dengan teori perbandingan sosial.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu tentang karakter moral dari seseorang penghindar pajak yang dipengaruhi oleh tujuan untuk menghindari pajak. Seseorang akan menghindari pajak jika orang lain yang dinilai memiliki moral tinggi, misalnya warga negara yang baik atau pengusaha yang jujur, melakukan penghindaran pajak. Seseorang akan mengurangi perilakunya untuk menghindari pajak jika melihat kondisi orang lain yang menghindari pajak tidak menguntungkan. Seseorang akan berasumsi bahwa persepsi ketidakwajaran menyebabkan penghindaran pajak yang meningkat dan jika hukum tersebut dirasakan lebih adil, maka akan mengarah pada kepatuhan pajak yang akan meningkat (Spicer dan Lundstedt, 1976; Kaplan dan Reckers, 1985; Gerbing, 1988; Coleman, 1997; Alm *et al.*, 2015; Cyan *et al.*, 2016).



### 3. Pembahasan Hipotesis 3

Hasil pengujian hipotesis ke-3 (Tabel 4.7) menunjukkan bahwa penghasilan (PHSL) berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penghindaran pajak (KCD). Jadi, pernyataan hipotesis ke-3 tentang wajib pajak berpenghasilan tinggi memiliki kecenderungan yang tinggi untuk menghindari pajak, jika dibandingkan dengan wajib pajak yang berpenghasilan rendah didukung dan sesuai dengan teori keadilan.

Simpulan bahwa wajib pajak berpenghasilan tinggi (orang kaya) membayar pajak dengan jumlah lebih sedikit sudah dibuktikan oleh teori keadilan. Wajib pajak dengan penghasilan tinggi dipandang memiliki sumber daya untuk memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) dan membayar pajak dengan jumlah yang jauh lebih kecil daripada seharusnya, bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Penelitian-penelitian terdahulu juga menguji dugaan bahwa wajib pajak merasa tidak percaya dengan sistem pajak, yang mana mereka mencurigai yang kaya umumnya melarikan diri dari kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Sebaliknya, berlawanan dengan teori keadilan, teori perbandingan sosial menyatakan bahwa ketika dihadapkan dengan ketidakadilan yang tampak di depan mata, wajib pajak bisa saja tidak memilih melalaikan pajak jika mereka memandang pihak lain secara sosial atau moral tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, teori perbandingan sosial berfungsi sebagai penyeimbang (*counter balance*) atau *theory gap*. Menurut teori perbandingan sosial, seseorang akan memutuskan untuk memperbaiki tindakannya berdasarkan pada informasi dan perilaku orang lain (Jones dan Gerard, 1967; Song dan Yarbrough (1978); McCrohan dan Sugrue,

1998; Varosi *et al.*, 2000; Husein, 2003; Hutama, 2010; Hutama, 2011; Nar, 2015; Alm *et al.*, 2015; Cyan *et al.*, 2016).

#### 4. Pembahasan Hipotesis 4

Hasil pengujian hipotesis ke-4 (Tabel 4.7) menunjukkan bahwa persepsi etis (PE) tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penghindaran pajak (KCD). Jadi, pernyataan hipotesis ke-4 tentang wajib pajak dengan persepsi etis pada penggelapan pajak memiliki kecenderungan yang tinggi untuk menghindari pajak tidak didukung.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, McGee (2006) merumuskan tiga opini atau 3 teori *mainstream* yang memandang etis atau tidak etisnya penggelapan pajak dan banyak dijadikan acuan oleh banyak peneliti, yaitu opini tidak etis (*the unethical opinion*), opini anarkis (*the anarchist opinion*), dan opini keadaan (*the circumstance opinion*). Opini yang pertama adalah opini tidak etis pada penggelapan pajak (*The Unethical Opinion*). Opini ini menyatakan bahwa penggelapan pajak selalu atau hampir selalu tidak etis. Rasional yang mendasari opini ini adalah individu mempunyai tugas membayar pajak sesuai dengan permintaan negara, adanya kepercayaan yang kuat bahwa individu seharusnya mematuhi kesepakatan bersamalah, dan membayar pajak sebagai tugas yang etis adalah individu mempunyai kewajiban kepada warga negara lain.

Opini kedua adalah opini anarkis pada penggelapan pajak (*The Anarchist Opinion*). Opini ini berpendapat bahwa tidak pernah ada kewajiban untuk membayar pajak sebab negara tidak mempunyai legitimasi dan dianggap tidak bermoral sehingga tidak memiliki otoritas untuk mengambil apapun dari siapapun.

Pada opini ini, negara dipandang sebagai mafia. Intinya adalah pajak dipandang sebagai pengambilan hak orang lain.

Opini ketiga adalah opini yang bergantung pada suatu keadaan tertentu pada penggelapan pajak (*The Circumstance Opinion*). Opini ini beranggapan bahwa selalu ada alasan untuk melakukan penggelapan pajak. Beberapa dari penganut aliran ini memutuskan membayar pajak karena alasan moral, agama, dan kepercayaan. Selain itu, penggelapan pajak bisa saja etis dalam kondisi tertentu dan tidak etis pada kondisi yang lain.

Dari ketiga opini tersebut dan hubungannya dengan kecenderungan penghindaran pajak, penelitian ini tidak mendukung bahwa wajib pajak yang mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak adalah etis memiliki kecenderungan yang tinggi untuk menghindari pajak. Dengan kata lain, wajib pajak dengan opini tidak etis (*the unethical opinion*) dan opini keadaan (*the circumstance opinion*) pada penggelapan pajak tidak selalu memiliki kecenderungan penghindaran pajak lebih rendah daripada wajib pajak dengan opini anarkis (*the anarchist opinion*) pada penggelapan pajak (Block, 1993; Crow 1994; Cohn, 1998; Smith dan Kimball, 1998; McGee, *et al.*, 2011; McGee, 2012).

## 5. Pembahasan Hipotesis 5

Hasil pengujian hipotesis ke-5 (Tabel 4.8) menunjukkan bahwa prinsip moral (PM) berpengaruh signifikan terhadap preferensi wajib pajak dalam mengikuti program amnesti pajak (TA). Jadi, pernyataan hipotesis ke-5 tentang wajib pajak dengan prinsip moral yang tinggi memilih untuk mengikuti program TA didukung.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi teori perbandingan sosial dan tidak sesuai dengan teori keadilan. Karakter moral dari seseorang penghindar pajak dipengaruhi oleh tujuan untuk menghindari pajak. Seseorang akan menghindari pajak jika orang lain yang dinilai memiliki moral tinggi, misalnya warga negara yang baik atau pengusaha yang jujur, melakukan penghindaran pajak. Seseorang akan mengurangi perilakunya untuk menghindari pajak jika melihat kondisi orang lain yang menghindari pajak tidak menguntungkan. Seseorang akan berasumsi bahwa persepsi ketidakwajaran menyebabkan penghindaran pajak yang meningkat dan jika hukum tersebut dirasakan lebih adil, maka akan mengarah pada kepatuhan pajak yang akan meningkat (Spicer dan Lundstedt, 1976; Kaplan dan Reckers, 1985; Gerbing, 1988; Coleman, 1997; Gangl *et al.*, 2015; Alm *et al.*, 2015; Cyan *et al.*, 2016).

## 6. Pembahasan Hipotesis 6

Hasil pengujian hipotesis ke-6 (Tabel 4.8) menunjukkan bahwa penghasilan (PHSL) berpengaruh signifikan terhadap preferensi wajib pajak dalam mengikuti program amnesti pajak (TA). Jadi, pernyataan hipotesis ke-6 tentang wajib pajak dengan penghasilan tinggi memilih untuk mengikuti program TA didukung.

Berlawanan dengan teori keadilan, teori perbandingan sosial menyatakan bahwa ketika dihadapkan dengan ketidakadilan yang tampak di depan mata, wajib pajak bisa saja tidak memilih melalaikan pajak jika mereka memandang pihak lain secara sosial atau moral tidak bertanggung jawab (Varosi *et al.*, 2000). Dalam hal ini, teori perbandingan sosial berfungsi sebagai penyeimbang (*counter balance*) atau *theory gap*. Menurut teori perbandingan sosial, seseorang akan memutuskan

untuk memperbaiki tindakannya berdasarkan pada informasi dan perilaku orang lain (Jones dan Gerard, 1967). Oleh sebab itu, wajib pajak yang memilih untuk mengikuti program TA dapat dikategorikan wajib pajak yang patuh dan sebaliknya. Penelitian ini mengkonfirmasi hasil yang sama dengan teori perbandingan sosial.

## 7. Pembahasan Hipotesis 7

Hasil pengujian hipotesis ke-7 (Tabel 4.8) menunjukkan bahwa persepsi etis (PE) berpengaruh signifikan terhadap preferensi wajib pajak dalam mengikuti program amnesti pajak (TA). Jadi, pernyataan hipotesis ke-7 tentang wajib pajak dengan persepsi tidak etis pada penggelapan pajak memilih untuk mengikuti program TA didukung.

McGee (2006), mengembangkan tiga teori *mainstream* yang banyak dijadikan acuan oleh banyak peneliti, yaitu opini tidak etis (*the unethical opinion*), opini anarkis (*the anarchist opinion*), dan opini keadaan (*the circumstance opinion*). Dari ketiga opini tersebut dan hubungannya dengan kecenderungan penghindaran pajak, penelitian ini bisa membuktikan bahwa wajib pajak dengan persepsi etis pada penggelapan pajak memilih untuk mengikuti program amnesti pajak. Dengan kata lain, penelitian ini bisa membuktikan bahwa wajib pajak dengan opini tidak etis (*the unethical opinion*) dan opini keadaan (*the circumstance opinion*) pada penggelapan pajak lebih memilih mengikuti program amnesti pajak daripada wajib pajak dengan opini anarkis (*the anarchist opinion*) pada penggelapan pajak. (Block, 1993; Crow 1994; Cohn, 1998; Smith dan Kimball, 1998; McGee, *et al.*, 2011; McGee, 2012). Oleh sebab itu, penelitian ini mengkonfirmasi teori perbandingan sosial.

## 8. Pembahasan Hipotesis 8

Hasil pengujian hipotesis ke-8 (Tabel 4.8) menunjukkan bahwa kecenderungan penghindaran pajak (KCD) tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi wajib pajak dalam mengikuti program amnesti pajak (TA). Jadi, pernyataan hipotesis ke-8 tentang wajib pajak dengan kecenderungan penghindaran pajak yang rendah memilih untuk mengikuti program TA tidak didukung.

Penelitian-penelitian sebelumnya berkesimpulan bahwa wajib pajak dengan kecenderungan penghindaran pajak yang rendah, merupakan wajib pajak yang taat pajak dan sesuai dengan teori perbandingan sosial (Hite, 1988; Hite, 1990; McCrohan & Sugrue, 1998; Gangl *et al.*, 2015; Bayer *et al.*, 2015). Namun begitu, teori keadilan berkesimpulan bahwa wajib pajak akan memilih untuk tidak membayar pajak atau tidak patuh karena memandang orang lain melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak (Varosi *et al.* 2000; Hutama, 2010; Hutama, 2011; Alm *et al.*, 2015; Cyan *et al.*, 2016).

Teori perbandingan sosial dan teori keadilan yang bertolak belakang ini menjelaskan mengapa wajib pajak memilih untuk patuh pajak atau tidak patuh pajak. Wajib pajak bisa patuh pajak dengan memilih mengikuti program TA atau memilih untuk tidak patuh pajak dengan tidak mengikuti program TA. Oleh sebab itu, penelitian ini sesuai dengan teori keadilan.